

**TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN  
RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) KEPEGAWAIAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
(RAKORNIS HARUS SUBSTANTIF, INTERAKTIF, DAN IMPLEMENTATIF)**

**TAUHID THALIB, S.E., M.M.**  
*Analisis SDM Aparatur Ahli Muda*

## **PENDAHULUAN**

Terkendalinya pandemi covid-19 di 2022 ini memunculkan optimisme menggeliatnya aktifitas yang bersifat interaktif dan menghadirkan peserta dalam jumlah banyak. Tidak lagi terbatas baik dari sisi peserta ataupun durasi waktu. Bahkan di era pasca pandemi nanti, melalui penggunaan teknologi selama pandemi, justru akan semakin banyak pihak yang bisa mengikuti suatu acara (hybrid/luring dan daring).

Salah satu kegiatan lingkup Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BKD) yang bersifat terbuka adalah Rapat Koordinasi Teknis Kepegawaian lingkup Provinsi Sulawesi Tengah (Rakornis Kepegawaian). Rapat tersebut berskala provinsi dan selama 2 tahun pandemi tidak dilaksanakan. Adanya kebijakan pelonggaran aktifitas masyarakat termasuk pemerintahan tentu memungkinkan rakornis tersebut diinisiasi untuk diselenggarakan kembali.

### ***Rakornis Kepegawaian***

Rakornis Kepegawaian Tingkat Prov. Sulteng terakhir dilaksanakan pada 2019. Saat itu berlangsung di Kota Poso Kabupaten Poso. Pasca itu, selama 2 tahun, 2020 dan 2021 rakornis tidak dilaksanakan mengingat pandemi covid-19.

Rakornis di Poso pada 2019, adalah rakornis keenam. Rakornis dirintis sejak Tahun 2014, dengan penyelenggara awal BKD Prov. Sulteng. Saat itu disepakati jika pertemuan yang dimaknai sebagai ajang silaturahmi dan media tukar menukar informasi sekaligus sinkronisasi manajemen kepegawaian daerah ini dilakukan setiap tahun dengan tempat penyelenggaraan berpindah-pindah pada Kab/Kota di Sulteng. Pembiayaan pelaksanaan Rakornis juga tidak sepenuhnya menjadi beban tuan rumah. BKD Prov. Sulteng sebagai pihak berkepentingan utama, turut andil mensupport pendanaan kegiatan. Sebelum di Poso, Rakornis Kepegawaian se-Sulteng telah dilaksanakan berkeliling di Palu (2015), Luwuk Kab. Banggai (2016), Bungku Kab. Morowali (2017), dan Ampana Kab. Touna pada Tahun 2018.

Format rakornis, pada selama enam kali perhelatan, secara rutin menghadirkan pembicara dari Pusat. Dalam hal ini dari dua instansi yang terkait dengan kebijakan dan manajemen kepegawaian nasional. Yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Materi yang disampaikan tentunya regulasi dan informasi tentang kebijakan dan pengelolaan kepegawaian yang terbaru atau lagi hangat diperbincangkan saat itu. Dengan begitu, antusiasme BKD Kab/Kota untuk hadir di rakornis menjadi lebih terangkat.

Waktu rakornis 2019 di Poso, dengan basis tema "Transformasi Manajemen Kepegawaian Menuju Birokrasi yang Bersih dan Beretika", menyuguhkan 2 materi yang saat itu lagi *viral*. Tentang tindak lanjut penanganan kejahatan jabatan (Tipikor) dan regulasi terkait Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Detailnya adalah, materi Sosialisasi Kebijakan Pembinaan Integritas, Penegakan Disiplin ASN dan Tindak Lanjut Penanganan Kejahatan Jabatan (TIPIKOR) oleh narasumber dari BKN. Dan Sosialisasi PP. Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disampaikan oleh pejabat dari Kemendagri RB.

Sedikit berbeda pada gawean rakornis keempat dan kelima. Rakornis keempat di Bungku Kab. Morowali Tahun 2017. Menghadirkan juga pembicara dari BKD Provinsi Jawa Barat (Jabar). Memaparkan kisah sukses mereka dalam pengelolaan kepegawaian Prov. Jabar. Kemudian rakornis kelima Tahun 2018 di Ampana Kab. Touna juga menyuguhkan pembicara lain. Selain pemateri Pusat, disisipkan materi suplemen berupa sosialisasi ketaspenan dan perbankan oleh pihak PT. Taspen Cab. Palu. Sesi ini sebagai bentuk sinergitas antar instansi pengelola kepegawaian. Sampai saat ini, Taspen adalah instansi yang ditunjuk mengelola dan membayar dana pensiun PNS.

Oleh penyelenggara, BKPSDM Kab. Touna, rakornis saat itu juga memberi ruang kepada produk khas daerah setempat. Dan ternyata cukup menarik animo peserta rakornis. Mereka membelinya sebagai buah tangan kembali ke kampungnya masing-masing.

Suasana berbeda dibanding pelaksanaan rakornis lainnya tersebut memunculkan asumsi bahwa Rakornis 2018 di Ampana Kab. Touna terbilang sukses. Dugaan itu boleh jadi benar. Ini diperkuat dengan fakta bahwa seluruh Kab/Kota di Sulteng mengutus pejabat pengelola kepegawaianya. Sesuai pantauan dan daftar hadir, BKD/BKPSDM seluruh Kab/Kota di Sulteng mengikuti acara yang berlangsung santai dan akrab tersebut. 6 Kabupaten bahkan dihadiri langsung oleh Kepala BKD/BKPSDM-nya. Sedang Kab/Kota lainnya mengutus pejabat administrasi (es III dan IV). Antusiasme mengikuti Rakornis saat itu bisa jadi karena stigma Kab. Tojo Unauna sebagai destinasi utama pariwisata Sulteng. Akses ke Kab. Tojo Unauna juga kini semakin mudah dan nyaman. Tersedia transportasi jalur darat dengan kualitas jalan yang mantap dan adanya transportasi udara dengan maskapai nasional yang sudah terjadwal harian.

Tidak berlebihan jika pelaksanaan Rakornis di Ampana itu dikatakan sukses. Sukses secara praktis, dimana acara berjalan lancar sesuai jadwal dan materi berikut narasumber yang direncanakan. Dikuti oleh seluruh Kab/Kota se Sulteng. Sukses pula secara substantis, karena maksud dari Rakornis sebagai wahana pertemuan seluruh BKD/BKPSDM se-Sulteng terwujud. Bahkan menghasilkan rekomendasi yang berkorelasi dengan materi yang didiskusikan dalam Rakornis.

## **TINJAUAN**

Mengklaim bahwa pelaksanaan Rakornis 2018 di Ampana sebagai tersukses diantara rakornis lainnya tentu sah-sah saja. Berdasar *record* pelaksanaan Rakornis yang ada, memang Rakornis kali inilah yang semarak. Di rakornis lainnya ada saja perwakilan Kab/Kota yang tak hadir. Tapi di Ampana, semua BKD/BKPSDM se Sulteng mengirim delegasinya. *Rundown* acara yang berlangsung lancar sesuai tahapan dan *on schedull* juga patut diacungi jempol. Bahkan masih sempat menyiapkan *farewell party* di malam harinya untuk mengakrabkan para peserta. Tentu ini tidak lepas dari peran panitia lokal (BKPSDM Kab. Tojo Unauna) yang memang cukup bersemangat dan akrab dalam mengelola kegiatan. Untuk itu apresiasi penuh wajib kita sampaikan kepada penyelenggara.

Menjudge keberhasilan tentu tidak bisa hanya dari satu sisi penyelenggaraan. Label ini pun kadang melenakan dan melemahkan imajinasi. Olehnya kita tetap harus focus dan melihat celah-celah yang perlu dibenahi. Mengingat pandemi covid-19 sudah jauh lebih melandai maka rakornis berpeluang besar untuk kembali dilaksanakan. Sebagai persiapan tentunya perlu tinjauan atas pelaksanaan rakornis yang lalu. Selanjutnya menjadi bahan penyusunan desain rakornis yang lebih baik. Berikut beberapa sektor penyelenggaraan yang menjadi tinjauan untuk mendapat perhatian bagi penyempurnaan kegiatan sejenis akan datang.

### **Materi Rakor**

Materi yang didiskusikan saat rakor, selain tentang persoalan kepegawaian yang sering terjadi atau sosialisasi regulasi terbaru terkait pengelolaan kepegawaian, juga harus membahas materi yang berkaitan langsung dengan tata kelola pelayanan kepegawaian di Sulteng dalam hal ini di tingkat BKD Provinsi. Dengan ini, bisa semakin jelas dan tegas apa dan bagaimana hal yang harus dilakukan dan

dipenuhi BKD/BKPSDM Kab/Kota ketika berurusan di BKD Provinsi. Intisari dari penyelenggaraan rakor justru pada hal ini. Yaitu untuk menyamakan pola pikir dan pola tindak semua pihak berkepentingan sehingga harmonisasi pengelolaan kepegawaian yang sesuai regulasi bisa terwujud.

Kisah sukses atau kiat baru pengelolaan kepegawaian juga perlu dipertimbangkan untuk menjadi materi rakor. Penyelenggaraan rakornis 2017 di Morowali & 2018 di Touna bisa jadi contoh. Saat itu, dihadirkan BKD Jabar untuk mempresentasikan manajemen kepegawaian *ala* Jabar yang memang menjadi kiblat tata kelola kepegawaian Indonesia saat ini (2017 di Morowali). Dan sosialisasi ketaspanan (2018 di Touna).

Jika belum ada lagi yang terbaru, akademisi yang berkompeten dibidang SDM pun boleh mengisinya dengan menyampaikan temuan-temuan *empiric* terkini terkait manajemen kepegawaian. Bahkan informasi dari pihak swasta atau praktisi SDM lainnya tentang tips & trik pengelolaan mereka terhadap perilaku karyawan dan organisasi juga patut kita dengar.

Singkatnya, pada penyelenggaraan rakor berikut, materi rakor harus semakin substantif. Yakni bisa menjawab kebutuhan/persoalan para pihak dan mampu memperkaya khasanah pengetahuan dan keilmuan dalam melaksanakan tugas sebagai insan pengelola SDM aparatur di daerah.

### **Desain Acara**

Rakornis akan datang harus membuka kesempatan berupa *session* acara khusus yang memungkinkan Kab/Kota menyampaikan pandangan atau keluh kesahnya (jika ada) tatkala berurusan di BKD Provinsi. Kita tidak boleh merasa benar terus. Posisi sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah bukan berarti segala-galanya. Boleh jadi, ini memberi suplemen positif bagi penyempurnaan tata cara kerja BKD Provinsi dalam memproses layanan kepegawaian.

Perlu didesain sedemikian rupa suatu acara dalam rakor sehingga Kab/Kota bisa nyaman secara lugas dan terus terang memberikan masukan dan *curhatnya*. Termasuk sekiranya ada perilaku menyimpang dari pihak-pihak tertentu. Saat perumusan rekomendasi rakornis lalu, sempat diinisiasi hal tersebut. Tapi tidak bisa maksimal mengingat acara sudah dipenghujung dimana energi dan konsentrasi sudah terpecah.

Tidak saja dari mereka, tetapi dari pihak Provinsi juga berkesempatan untuk menyampaikan *uneg-unegnya* tatkala mengurus layanan kepegawaian para pihak tersebut. Suasana interaktif akan terbentuk. Informasi tentang apa hal yang dibutuhkan Kab/Kota dari Provinsi tersampaikan, begitu pula sebaliknya, kebutuhan Provinsi dari Kab/Kota juga dapat diketahui. Dan ini menjadi pegangan dan komitmen bersama untuk dijalankan. Pendekatan ini diyakini bisa lebih implementatif.

### **Peserta Rakor**

Perlu diperluasnya kategori peserta rakornis di kegiatan akan datang juga masuk dalam radar tinjauan Kami. Pengelola kepegawaian tingkat Perangkat Daerah Provinsi harus dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari peserta rakornis kepegawaian.

Alasan bahwa mereka relatif lebih mudah berinteraksi dengan BKD Provinsi sehingga tidak perlu ikut rakornis menjadi terbantahkan ketika materi rakor sudah semakin berbobot dan mengangkat isu-isu faktual yang mampu memperkaya ilmu pengetahuan. Pengelola kepegawaian di perangkat daerah juga perlu mendapat penguatan.

Dari perspektif lain, rakornis di daerah dengan peserta yang semakin banyak ini akan menjadi pengungkit bagi ekonomi lokal. Diakui, kebergantungan daerah pada APBD masih sangat tinggi. Porsi pembiayaan swasta masih sangat kecil. Kunjungan para peserta dengan berbagai pembelanjaan atau pengeluaran mereka pada produk dan entitas lokal tentu sangat berarti bagi daerah setempat.

## **Review Kegiatan**

Perbaikan tidak akan maksimal jika masih dan hanya memakai cermin pribadi. Kita sudah harus membiasakan diri menerima saran dan kritikan. Termasuk dalam penyelenggaraan semacam ini. Apalagi yang diniatkan menjadi agenda rutin tahunan.

Ke depan, peserta rakornis harus diberi kesempatan untuk memberi tanggapan dan usulan atas pelaksanaan rakornis. Ini dilakukan melalui survei dengan mengedarkan kuesioner yang dikumpul selesai kegiatan. Subjektifitas tetap akan ada dan sulit terhindarkan. Tapi pasti diantaranya ada yang objektif. Review atas seluruh pelaksanaan acara rakornis ini (mulai tempat acara, materi, pemateri, panitia, sampai makanan yang disajikan, dan lainnya) akan sangat membantu perbaikan kegiatan akan datang.

Jika diperlukan, pengumpulan informasi terkait rakornis, juga dilakukan sebelum kegiatan. 3 – 4 bulan sebelum rakornis. Dalam artian, Kab/Kota menyampaikan usulan kebutuhan materi yang akan didiskusikan dalam rakornis. Jika perlu, lengkap dengan PIC yang bisa menjadi narasumber atas materi bersangkutan. Ini memungkinkan BKD Provinsi menyusun materi yang lebih sesuai dan berkesempatan untuk mengontak pemateri bersangkutan. Pola ini tentu membuat rakornis ke depan semakin bermanfaat.

## **PENUTUP**

Tinjauan diatas tentu semakin panjang jika ditilik lagi dari pendekatan lain, semisal perlunya pada acara rakornis jadi ajang penganugerahan (*reward*) atau penghargaan bagi Kab/Kota atau Perangkat Daerah Prov. Sulteng yang interaksi dan layanan kepegawaiannya baik. Ini tentu bisa memacu motivasi kerja lebih baik. Bisa pula pada rakornis, BKD Provinsi menyerahkan dokumen SK Pangkat Kab/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi. Atau tembusan atas penerbitan surat-surat atau dokumen lainnya. Walau berkesan seremonial, tapi akan menimbulkan kesan berbeda dan tidak monoton.

Lebih jauh lagi, untuk semakin semaraknya rakornis, keterlibatan pihak internal dan eksternal kepegawaian juga perlu dikaji kemungkinannya. Sehingga rakornis bisa diakses oleh publik setempat walau terbatas. UPT Penilaian Kompetensi BKD Provinsi mungkin bisa hadir membuka klinik pengenalan kompetensi oleh PNS setempat.

UPT BKN Palu mungkin bisa terlibat dengan memboyong perangkat CATnya untuk disimulasikan kepada para masyarakat/pelajar. Termasuk pula (jika ada) PNS yang mendekati pensiun tapi sudah siap dengan aktifitas baru yang bernilai ekonomis dan memamerkan kreasi atau dagangannya. Pihak perbankan atau lembaga keuangan lainnya yang terkait pun akan senang dan bersedia untuk meramaikan rakornis.

Akan semakin banyak. Tapi yang utama perlu diperhatikan adalah keempat hal diatas, materi rakor, desain acara, peserta rakor dan review kegiatan. Melaksanakan keempatnya pun, disadari tidak mudah. Pasti menimbulkan biaya yang tidak sedikit sekalipun tandem dengan Kab/Kota tuan rumah. Olehnya dukungan dan perhatian pimpinan Provinsi Sulawesi Tengah sangat dibutuhkan. Penganggaran pada kegiatan ini tentu perlu menjadi perhatian. Ini dengan maksud agar Rakornis Kepegawaian Provinsi Sulawesi Tengah pasca pandemi nanti bisa lebih substantif, interaktif dan implementatif

Demikian sekelumit tinjauan Kami atas beberapa kali penyelenggaraan rakornis kepegawaian Prov. Sulteng lalu. Semoga bermanfaat.

## **BIODATA PENULIS**

- A. Identitas Diri
1. Nama : TAUHID THALIB, SE, MM.
  2. NIP : 197302152010011009
  3. Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Muda
  4. Pangkat / Golru : Penata Tkt I / III/d
  5. Unit Kerja : BKD Prov. Sulteng
  6. Jenis Kelamin : Pria
  7. Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Februari 1973
  8. Alamat Rumah : Jl. M. H. Thamrin No. 52, Palu
- B. Riwayat Jabatan: 1. Analis Kepegawaian Ahli Pertama – 2013; 2. Analis Kepegawaian Ahli Muda – 2016; 3. Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian – 2017; 4. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Dan Profesi ASN – 2021; 5. Analis SDM Aparatur Ahli Muda - 2022
- C. Riwayat Pendidikan: 1. SD: Tahun 1985; 2. SMP: Tahun 1988; 3. SMA: Tahun 1991; 4. S1 Ekonomi Manajemen: Tahun 1998; 5. S2 Magister Manajemen: Tahun 2012